



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN JAWAI TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun oleh Perangkat Daerah sebagai tindaklanjut dan penjabaran dari ditetapkannya RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, target dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas untuk Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan dimasa yang akan datang serta menjadi arah, acuan dan motivasi peningkatan kinerja bagi pelaksana tugas di Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak dijumpai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini apabila dilakukan review atas Renstra Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dimasa mendatang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terima kasih.

Jawai, September 2025
Camat Jawai,


H. IZAMI, S.Pd, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19700506 199803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	1
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	9
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	24
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	26
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Jawai Tahun 2025-2029.....	26
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Jawai Tahun 2025-2029	26
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	28
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	29
BAB IV ROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	31
4.1 Uraian Program	31
4.2 Uraian Kegiatan	35
4.3 Uraian Sub Kegiatan	35

4.4.Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	80
4.5.Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	80
BAB V PENUTUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Per Juli 2025	10
Tabel 2. 2 Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan Per Juli 2025	10
Tabel 2. 3 Jumlah dan Persentase Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin Per Juli 2025	11
Tabel 2. 4 Jumlah dan Persentase Sumber Daya Manusia Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Per Juli 2025	11
Tabel 2. 5 Jumlah dan Persentase Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Per Juli 2025.....	11
Tabel 2. 6 Jumlah dan Persentasi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Per Juli 2025	12
Tabel 2. 7 Data Aset Kecamatan Jawai.....	12
Tabel 2. 8 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jawai Tahun 2022-2024.....	15
Tabel 2. 9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Tahun 2022-2024	16
Tabel 2. 10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Jawai	25
Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Jawai.....	28
Tabel 3. 2 Strategi PD dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Jawai Tahun 2025-2029	28
Tabel 3. 3 Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Jawai Tahun 2025-2029.....	29
Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah Kecamatan Jawai	33
Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Jawai.....	36
Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	58
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jawai.....	80
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Jawai.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan.....	2
Gambar 3. 1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Tahun 2025-2029 telah selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Sambas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen

Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun ke depan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Perangkat Daerah Kecamatan Jawai dalam kurun waktu tahun 2025-2029. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Jawai untuk 5 (lima) tahun ke depan. Secara operasional Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Tahun 2025-2029 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Tahun 2022-2026 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 5) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Darah Kabupaten Sambas Nomor 82);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Darah Kabupaten Sambas Nomor 83)

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan disusun dengan maksud:

- a. sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029;
- b. sebagai peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan di wilayah kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sambas pada unsur kewilayahan yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. memberikan arah pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah Kecamatan Jawai;
- d. memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, dan program pembangunan dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- e. mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

2. Tujuan

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah pada bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.

- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Jawai.
- e. Menjadi acuan kerja bagi Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas serta pihak terkait dalam upaya pembangunan pada bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strateigs Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

4.2. Uraian Kegiatan

4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB VI PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

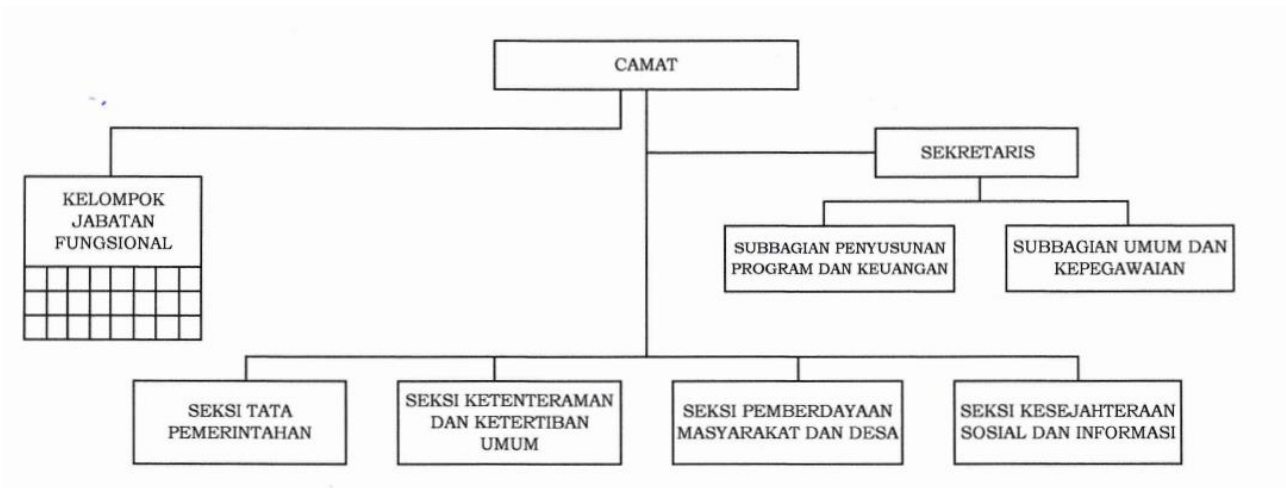
Di dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, yang dimaksud Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Dan Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
Sekretariat Kecamatan membawahi:
 - (a) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - (b) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Kecamatan membawahi Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi-Seksi masing-

masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan

Organisasi memegang peranan penting dan menentukan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia karena organisasi adalah alat dari manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang berkerja sama secara rasional untuk sesuatu tujuan bersama secara rasional dan terikat secara formal dalam bentuk persekutuan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa organisasi adalah alat dari administrasi dan manajemen dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sukses tidaknya administrasi dan manajemen dalam melaksanakan fungsi pengorganisasiannya dapat dinilai dari kemampuannya untuk menciptakan suatu organisasi yang baik, efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan organisasi yang baik, efisien dan efektif adalah organisasi yang dalam pembinaan dan pendayagunaannya selalu berpedoman atau menerapkan asas-asas pengorganisasian yang ilmiah dan rasional.

Untuk menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran diperlukan berbagai aktivitas. Aktivitas adalah kegiatan organisasi yang merupakan kesepakatan atau penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kunci dari suatu aktivitas antara lain tercermin pada tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok adalah suatu jenis pekerjaan spesifik yang diserahkan kepada pejabat-pejabat tertentu untuk dilaksanakan. Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang

tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya atau pelaksanaannya. Untuk melancarkan sesuatu usaha kerja sama, aktivitas yang sama jenis tersebut biasanya digabungkan menjadi suatu kesatuan dan diserahkan menjadi tanggung jawab seorang pejabat atau satuan organisasi tertentu. Dengan demikian, dalam pandangan organisasi yang dinamis mempunyai makna bahwa suatu organisasi tidak hanya dipandang sebagai bentuk atau wadah saja, tetapi dapat dipandang sebagai sistem kerja sama, sistem tata hubungan kerja, dan sebagai proses pembagian tugas.

Adapun tugas dan fungsi yang ada di Perangkat Daerah Kecamatan Jawai diuraikan sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain tugas di atas, Camat melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan penyusunan program, keuangan, surat menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di sekretariat serta penyelarasan dan kompilasi program kerja kecamatan;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan sumberdaya manusia, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan umum, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol dan rumah tangga kecamatan;
- c. pelaksanaan tata usaha keuangan, perbendaharaan serta menyiapkan bahan laporan keuangan;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan dan akuntabilitas kinerja kecamatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.

3. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan sesuai dengan rencana kerja kecamatan;

- b. penghimpunan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran kecamatan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan kecamatan;
 - d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan kecamatan;
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan kecamatan;
 - f. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang harmonis dan saling mendukung;
 - g. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan;
4. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, urusan dalam, surat-menyurat, perlengkapan dan kepegawaian di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
 - c. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan dan pendistribusian barang perlengkapan;
 - e. penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai kecamatan;
 - f. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - g. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
- b. penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dalam bidang keagrariaan;
- g. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
- c. pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. pelaksanaan penanggulangan dini terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum;
 - h. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas;
 - i. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - j. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai rencana kerja kecamatan;
 - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa atau kelurahan, koperasi dan melakukan pendataan insustri kecil dan kerajinan serta usaha gotong-royong;
 - d. penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup dan koordinasi kebersihan, sanitasi dan keindahan lingkungan;

- e. pembinaan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musrenbang di desa/kelurahan dan Kecamatan;
 - f. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan sarana prasarana dan program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun pihak swasta;
 - g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan;
 - h. penyusunan usulan strategi pengembangan dan pembangunan ekonomi lokal;
 - i. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - j. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
8. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan informasi pelayanan publik.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi;
- b. pelaksanaan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagai tugas Bupati di bidang sosial;
- c. pelaksanaan penanggulangan dini terhadap penyakit masyarakat dan bencana alam;
- d. pelaksanaan dan pengoordinasian upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;

- f. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
 - g. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi;
 - h. pelaksanaan pembinaan kegiatan seni, budaya, pemuda dan olahraga;
 - i. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - j. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris. Jenis, jenjang jabatan dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan melalui formasi PNS.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 16 (lima belas) orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 14 (empat belas) orang dan honorer

sebanyak 2 (dua) orang. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.1 Komposisi Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Per Juli 2025

Jabatan	Golongan				Pendidikan				Ket
	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SLTA	
Camat	1	-	-	-	1	-	-	-	
Sekretaris Kecamatan	1	-	-	-	-	1	-	-	
Kepala Seksi	-	4	-	-	-	4	-	-	
Kepala Subbagian	-	2	-	-	-	-	-	2	
Jumlah	2	6	-	-	1	5	-	2	

Tabel 2. 2 Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan Per Juli 2025

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	H. IZAMI, S.Pd, MM NIP 19700506 199803 1 003	Pembina Tk. I (IV/b)	Camat	S.2
2	DEDI SETIANA, SH NIP 19720519 199303 1 002	Pembina (IV/a)	Sekretaris Kecamatan	S1
3	IEIN SULISTIANA NIP 19800909 200212 2 006	Penata (III/c)	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	SI
4	JONIARDI, SKM NIP 19670618 198801 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi	S.1
5	ERNAWATI, S.Pi NIP 19720329 200502 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	S.1
6	ENDRIADI, S.I.P. NIP 19800424 201101 1 005	Penata (III/c)	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	S.1
7	HARZANA NIP 19670808 198903 2 007	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	SLTA
8	RAHMAT NIP 19690422 199112 1 001	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan	SLTA
9	ROAINI, S.I.P. NIP 19720701 200906 1 006	Penata Muda (III/a)	Pelaksana	S.1

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
10	H. KARTONO, S.I.P NIP 19690213 200701 1 027	Penata Muda (III/a)	Pelaksana	S.1
11	SUPARDI NIP 19841115 200902 1 005	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pelaksana	SLTA
12	RUMLI, S.I.P NIP 19800628 200212 1 004	Penata Muda (III/a)	Pelaksana	S.1
13	MINHARWAN, S.H.,S.E NIP 19771219 200801 1 008	Penata Muda (III/a)	Pelaksana	S.1
14	REZA RAMADANDI, S.IP NIP 19980312 202506 1 002	Penata Muda (III/a)	Pelaksana	S.1
15	SABTUNI, A.Md	-	Honorar	D.III
16	AGUSTIAN, A.Md	-	Honorar	D.III

Tabel 2. 3 Jumlah dan Persentase Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin Per Juli 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Struktural	6	2	8	40%	13,33%	53,33%
2	Fungsional	-	-	-	-	-	-
3	Staf	7	-	7	46,67%	-	46,67%
	Jumlah	13	2	15	86,67%	13,33%	100%

Tabel 2. 4 Jumlah dan Persentase Sumber Daya Manusia Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Per Juli 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Eselon III	2	0	2	25,00%	0%	25,00%
2	Eselon IV	4	2	6	50,00%	25,00%	75,00%
	Jumlah	6	2	8	75,00%	25,00%	100%

Tabel 2. 5 Jumlah dan Persentase Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Per Juli 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Golongan IV	2	-	2	15,38%	0%	15,38%
2	Golongan III	8	2	10	61,54%	15,38%	76,92%
3	Golongan II	1	-	1	7,69%	0%	7,69%
	Jumlah	11	2	13	84,62%	15,38%	100%

Tabel 2. 6 Jumlah dan Persentasi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Per Juli 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	S2	1	-	1	7,69%	0%	7,69%
2	D4/S1	8	1	9	61,54%	7,69%	69,23%
3	D1-D3	-	-	-	0%	0%	0%
4	SLTA	2	1	3	15,38%	7,69%	23,08%
	Jumlah	11	2	13	84,62%	15,38%	100%

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas 3.116 meter persegi milik Pemerintah Kabupaten Sambas yang berada di Jalan Stadion Desa Sentebang dan mulai digunakan pada tahun 1958. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2. 7 Data Aset Kecamatan Jawai

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Nilai	Kondisi		
					B	KB	RB
1	TANAH						
1.1	Tanah Kantor	bidang	1	450.000	1		
1.2	Tanah Rumah Dinas	bidang	1	741.600	1		
1.3	Tanah Lapangan	bidang	1	720.000	1		
1.4	Tanah Balai Pertemuan	bidang	1	1.971.000	1		
1.5	Tanah Bangunan Olahraga	bidang	1	5.135.780.000	1		
JUMLAH			5	5.139.662.600	5	-	-
2	ALAT ANGKUTAN						
2.1	Mobil	buah	1	117.500.000	1		
2.2	Sepeda Motor	buah	14	261.798.800	14		
JUMLAH			15	379.298.800	15	-	-
3	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI						
3.1	Radio SSB + Power Supply + Antena	set	1	17.274.000			1
3.2	Wireles Portable Sound System	buah	1	6.445.000	1		
JUMLAH			2	23.719.000	1	-	1

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Nilai	Kondisi		
					B	KB	RB
4	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA						
4.1	Filling Cabinet	buah	3	7.510.000	2		1
4.2	Mesin Pemotong Rumput	buah	2	2.300.000	2		
4.3	Kursi Tamu	buah	3	5.076.000	3		
4.4	Lemari Makan Kaca	buah	1	700.000	1		
4.5	Tempat Tidur Bed Cover	buah	1	2.100.000	1		
4.6	Meja Panjang	buah	4	3.850.000	4		
4.7	Kursi Besi Lipat	buah	25	12.770.000	25		
4.8	Lemari Pakaian	buah	1	1.800.000	1		
4.9	Kaca Rias + Kursi	set	1	700.000	1		
4.10	Kipas Angin	buah	4	1.590.000	4		
4.11	Televisi	buah	2	5.075.000	1	1	
4.12	Antena Parabola	buah	1	900.000			1
4.13	Meja Kerja Pejabat	buah	3	9.570.000	3		
4.14	Kursi Kerja Pejabat	buah	4	4.532.000	4		
4.15	CPU	buah	1	6.000.000	1		
4.16	Kursi Hadap Eselon III	buah	2	1.056.000	2		
4.17	Meja Komputer	buah	1	300.000	1		
4.18	UPS	buah	2	900.000			2
4.19	Hard Disc 80 GB	buah	1	600.000	1		
4.20	Printer	buah	11	15.699.999	11		
4.21	Memori Ram DDR 2 GB	buah	1	400.000	1		
4.22	Mesin Genset	buah	1	15.000.000	1		
4.23	Mesin Pemadam Kebakaran	buah	1	15.000.000		1	
4.24	Selang Pengeluaran	buah	4	5.000.000	4		
4.25	Selang Penyedot	buah	1	2.500.000	1		
4.26	Nozzle	buah	1	2.500.000	1		
4.27	Komputer PC	set	7	58.949.552,63	7		
4.28	Laptop	buah	8	58.825.000	8		
4.29	Meja Kerja	buah	2	3.069.000	2		
4.30	Meja Informasi	buah	1	1.793.000	1		
4.31	Infocus	buah	1	6.968.500	1		
4.32	Lemari Arsip	buah	6	13.992.000	6		

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Nilai	Kondisi		
					B	KB	RB
4.33	Air Conditioner (AC)	buah	1	4.950.000	1		
4.34	Rak Buku	buah	9	6.703.126	9		
4.44	Mesin Absensi	buah	1	12.540.000	1		
4.45	Kursi Besi/Metal	buah	2	5.500.000	2		
JUMLAH			108	336.838.178,63	102	2	4
5	GEDUNG						
5.1	Mess Praja	buah	1	40.750.000,00		1	
5.2	Gedung Kantor	buah	2	581.725.337,50	1	1	
5.3	Rumah Dinas Camat	buah	1	225.866.000,00	1		
5.4	Gedung Olahraga	buah	1	177.482.000,00	1		
5.5	Gedung Serba Guna	buah	1	17.496.000,00		1	
5.6	Tribune Sepak Bola	buah	1	63.013.167,00	1		
JUMLAH			7	1.106.332.504,50	4	3	-
6	ASET TETAP LAINNYA						
6.1	Buku Perpustakaan	eksampler	1.000	50.567.100	1.000		
JUMLAH			1.000	50.567.100	1.000	-	-
TOTAL			1.137	6.948.218.183,13	1.127	5	5

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk dapat mengukur kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*. Indikator kinerja *input* merupakan sekumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Indikator kinerja *output* merupakan keluaran nyata dan langsung dapat dilihat setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Indikator kinerja *outcome* adalah hasil atau manfaat langsung yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. *Benefit* dan *impact* merupakan manfaat yang berdampak lebih luas kepada masyarakat. *Benefit* dan *impact* merupakan hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang

telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada output atau outcome dan sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) dan indikator *benefit*. Indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan keberhasilan/ ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pelaksanaan teknis kewilayahan di kecamatan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Beberapa capaian indikator kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jawai Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	83,50	83,53	86,50	86,55	89,25	89,30

Data realisasi dan anggaran yaitu belanja langsung dan tidak langsung pada tahun 2022 sampai dengan 2024 menunjukkan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik. Adapun data anggaran dan realisasi pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Jawai tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2. 9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Tahun 2022-2024

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	1	2	3
(1)		(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,860,440,261.00	1,914,214,013.00	1,941,961,205.00	1,829,272,645.00	1,857,711,144.00	1,732,653,573.00	0.98	0.97	0.89
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,878,204.00	16,449,428.00	14,886,240.00	15,822,000.00	16,387,400.00	11,619,800.00	1.00	1.00	0.78
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,957,396.00	3,099,584.00	3,014,682.00	3,954,300.00	3,039,100.00	2,728,000.00	1.00	0.98	0.90
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,437,929.00	3,539,474.00	3,430,366.00	2,437,350.00	3,539,100.00	3,132,600.00	1.00	1.00	0.91
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,641,800.00	-		1,639,700.00	-		1.00	0.00	0.00
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,321,047.00	3,902,474.00	3,341,816.00	1,320,000.00	3,902,100.00	2,758,900.00		1.00	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,321,047.00	-		1,320,000.00					
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,478,516.00	2,215,470.00	2,333,017.00	1,453,150.00	2,215,300.00	806,200.00			
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,720,469.00	3,692,426.00	2,766,359.00	3,697,500.00	3,691,800.00	2,194,100.00			
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,482,616,323.00	1,500,845,179.00	1,449,797,924.00	1,437,633,976.00	1,449,701,405.00	1,296,204,816.00	0.97	0.97	0.89
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,446,744,446.00	1,465,436,040.00	1,414,263,103.00	1,401,773,676.00	1,414,414,405.00	1,264,658,616.00	0.97	0.97	0.89

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	1	2	3
(1)		(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29,280,000.00	29,280,000.00	29,280,000.00	29,280,000.00	29,280,000.00	26,840,000.00	1.00	1.00	0.92
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,404,352.00	2,022,007.00	2,380,395.00	1,403,200.00	2,021,800.00	840,900.00	1.00	1.00	0.00
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4,081,870.00	4,107,132.00	3,874,426.00	4,078,500.00	3,985,200.00	3,865,300.00	1.00	0.97	1.62
1.2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,105,655.00	-	-	1,098,600.00	-	-	-	-	-
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17,100,000.00	10,462,000.00	-	35,082,900.00	9,745,000.00	-	2.05	0.93	0.00
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17,100,000.00	-	-	17,082,900.00	-	-	1.00	-	0.00
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	10,462,000.00	-	18,000,000.00	9,745,000.00	-	0.00	0.93	0.00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	107,250,184.00	176,600,378.00	209,505,465.00	105,165,600.00	173,726,505.00	167,930,420.00	0.98	0.98	0.80
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,564,400.00	21,032,620.00	15,644,862.00	5,564,400.00	21,012,300.00	15,634,600.00	1.00	1.00	1.00
1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8,163,933.00	10,077,544.00	10,086,021.00	8,162,500.00	10,072,000.00	10,075,300.00	1.00	1.00	1.00
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16,754,043.00	21,532,682.00	26,417,862.00	16,753,400.00	21,524,300.00	26,404,200.00	1.00	1.00	1.00
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,451,808.00	27,381,532.00	25,151,720.00	12,445,300.00	27,380,400.00	24,217,050.00	1.00	1.00	0.96

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Tahun 2025-2029

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	1	2	3
(1)		(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64,316,000.00	96,576,000.00	132,205,000.00	62,240,000.00	93,737,505.00	91,599,270.00	0.97	0.97	0.69
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,770,050.00	61,800,000.00	78,500,000.00	86,375,600.00	60,199,000.00	76,355,050.00	0.98	0.97	0.97
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43,000,000.00	47,000,000.00	48,000,000.00	42,020,000.00	45,880,000.00	45,880,000.00	0.98	0.98	0.96
1.5.2	Pengadaan Mebel	6,000,000.00	-	-	5,883,000.00	-	-	0.98	0.00	0.00
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29,100,000.00	-	30,500,000.00	28,926,600.00	-	30,475,050.00	0.99	0.00	1.00
1.5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,670,050.00	14,800,000.00	-	9,546,000.00	14,319,000.00	-	0.99	0.00	0.00
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69,978,000.00	78,597,028.00	106,807,576.00	69,782,269.00	78,567,134.00	102,756,567.00	1.00	1.00	0.96
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	1,320,000.00	2,338,600.00	1,200,000.00	1,320,000.00	2,229,600.00	1.00	1.00	0.95
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29,050,000.00	36,245,908.00	53,011,416.00	28,854,269.00	36,216,014.00	49,363,971.00	0.99	1.00	0.93
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39,728,000.00	41,031,120.00	51,457,560.00	39,728,000.00	41,031,120.00	51,162,996.00	1.00	1.00	0.99
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79,847,500.00	69,460,000.00	82,464,000.00	79,410,300.00	69,384,700.00	77,786,920.00	0.99	1.00	0.94
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36,257,500.00	21,310,000.00	21,454,000.00	35,820,700.00	21,235,400.00	16,786,100.00	0.99	1.00	0.78

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Tahun 2025-2029

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	1	2	3
(1)		(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,950,000.00	18,910,000.00	20,210,000.00	10,950,000.00	18,910,000.00	20,210,000.00	1.00	1.00	1.00
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32,640,000.00	29,240,000.00	40,800,000.00	32,639,600.00	29,239,300.00	40,790,820.00	1.00	1.00	1.00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	81,052,533.00	51,569,105.00	45,943,906.00	80,892,800.00	51,567,950.00	42,426,400.00	1.00	1.00	0.92
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12,710,485.00	7,012,306.00	6,607,812.00	12,678,000.00	7,011,600.00	3,665,500.00	1.00	1.00	0.55
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan/ Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3,743,990.00	7,012,306.00	6,607,812.00	3,728,200.00	7,011,600.00	3,665,500.00	1.00	1.00	0.55
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8,966,495.00			8,949,800.00					
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	13,458,603.00	9,230,649.00	9,175,434.00	13,420,500.00	9,230,200.00	9,173,900.00	1.00	1.00	1.00
2.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3,296,001.00	-	-	3,278,500.00	-	-	0.99	0.00	0.00
2.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10,162,602.00	9,230,649.00	9,175,434.00	10,142,000.00	9,230,200.00	9,173,900.00	1.00	0.00	0.00
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	54,883,445.00	35,326,150.00	30,160,660.00	54,794,300.00	35,326,150.00	29,587,000.00	1.00	1.00	0.98

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Tahun 2025-2029

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	1	2	3
(1)		(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	14,601,500.00	-	30,160,660.00	14,569,800.00	-	29,587,000.00	1.00	0.00	0.98
2.3.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	40,281,945.00	35,326,150.00		40,224,500.00	35,326,150.00				
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	109,670,188.00	94,255,112.00	107,805,256.00	109,419,450.00	94,203,900.00	67,484,500.00	1.00	1.00	0.63
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	105,264,198.00	87,105,712.00	97,789,791.00	105,029,000.00	87,054,500.00	62,047,500.00	1.00	1.00	0.63
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10,861,311.00	15,170,700.00	15,473,450.00	10,637,450.00	15,170,700.00	15,469,000.00	0.98	1.00	1.00
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	94,402,887.00	71,935,012.00	82,316,341.00	94,391,550.00	71,883,800.00	46,578,500.00	1.00	1.00	0.57
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4,405,990.00	7,149,400.00	10,015,465.00	4,390,450.00	7,149,400.00	5,437,000.00	1.00	1.00	0.54
3.2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4,405,990.00	7,149,400.00	10,015,465.00	4,390,450.00	7,149,400.00	5,437,000.00	1.00	1.00	0.54
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	32,386,259.00	53,475,122.00	54,213,035.00	32,232,950.00	53,473,850.00	54,174,850.00	1.00	1.00	1.00
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	32,386,259.00	53,475,122.00	54,213,035.00	32,232,950.00	53,473,850.00	54,174,850.00	1.00	1.00	1.00

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Tahun 2025-2029

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	1	2	3
(1)		(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)
4.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21,274,605.00	41,758,850.00	42,065,018.00	21,186,800.00	41,758,850.00	42,038,350.00	1.00	1.00	1.00
4.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	6,061,279.00	5,085,026.00	5,117,570.00	6,039,100.00	5,084,600.00	5,113,100.00	1.00	1.00	1.00
4.1.3	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	2,635,185.00	3,834,628.00	3,822,659.00	2,594,550.00	3,834,200.00	3,818,200.00			
4.1.4	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2,415,190.00	2,796,618.00	3,207,788.00	2,412,500.00	2,796,200.00	3,205,200.00			
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75,030,431.00	62,227,418.00	60,485,088.00	74,510,100.00	61,796,800.00	58,214,500.00	0.99	0.99	0.96
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75,030,431.00	62,227,418.00	60,485,088.00	74,510,100.00	61,796,800.00	58,214,500.00	0.99	0.99	0.96

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	1	2	3
(1)		(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)
5.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3,132,923.00	-	-	3,128,500.00	-	-	1.00	-	-
5.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3,291,343.00	6,628,536.00	6,399,222.00	3,274,300.00	6,628,000.00	6,381,200.00	0.99	1.00	1.00
5.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32,255,182.00	27,457,892.00	26,381,741.00	31,773,700.00	27,454,000.00	24,146,800.00	-	1.00	0.92
5.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4,298,668.00	3,660,026.00	3,919,683.00	4,295,850.00	3,659,600.00	3,914,300.00	1.00	1.00	1.00
5.1.5	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	24,758,122.00	21,083,438.00	20,022,058.00	24,752,050.00	20,658,100.00	20,014,700.00	1.00	-	-
5.1.6	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3,661,086.00	-		3,657,000.00	-		1.00	-	1.00
5.1.7	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3,633,107.00	3,397,526.00	3,762,384.00	3,628,700.00	3,397,100.00	3,757,500.00		1.00	
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,163,809.00	30,639,334.00	15,321,536.00	15,156,872.00	35,135,500.00	11,111,200.00	1.00	1.15	0.73
6.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6,744,972.00	4,010,026.00	4,006,141.00	6,744,972.00	8,509,600.00	4,002,300.00	1.00	2.12	1.00

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	1	2	3
(1)		(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)
6.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2,904,486.00	-	-	2,881,200.00	4,500,000.00	-	0.99	-	-
6.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3,840,486.00	4,010,026.00	4,006,141.00	3,740,800.00	4,009,600.00	4,002,300.00	0.97	1.00	1.00
6.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8,418,837.00	26,629,308.00	11,315,395.00	8,411,900.00	26,625,900.00	7,108,900.00	1.00	1.00	0.63
6.1.3	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8,418,837.00	26,629,308.00	11,315,395.00	8,411,900.00	26,625,900.00	7,108,900.00	-	1.00	0.63
Jumlah		2,173,743,481.00	2,175,740,770.00	2,225,730,026.00	2,126,327,945.00	2,118,753,644.00	1,966,065,023.00	0.98	0.97	0.88

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan:

- Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
- Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
- Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
- Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
- Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sambas saat ini dan kemungkinan peranakan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut

atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan Langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jawai dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Jawai

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pelayanan publik	Tata kelola birokrasi di Kabupaten Sambas masih dianggap berbelit. Kapasitas ASN dan tingkat optimal OPD yang bertugas di pemerintahan masih perlu ditingkatkan. Informasi bagi semua masyarakat baik tentang pemerintahan maupun pelayanan publik masih belum transparan.	Reformasi Birokrasi	Pertumbuhan Kelas Menengah	Jaminan sosial belum merata	Tata Kelola Pemerintahan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
						Belum Optimalnya Sinkronisasi Tata Kelola Desa

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Jawai Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Jawai Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sambas dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Sambas menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien. Tujuan tersebut selaras dengan Misi IV RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, yaitu: “Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jawai, dalam hal ini Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Sambas dapat tercapai.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Jawai Tahun 2025-2029

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumberdaya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Berdasarkan pernyataan tujuan ditetapkanlah sasaran

Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas adalah “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.”

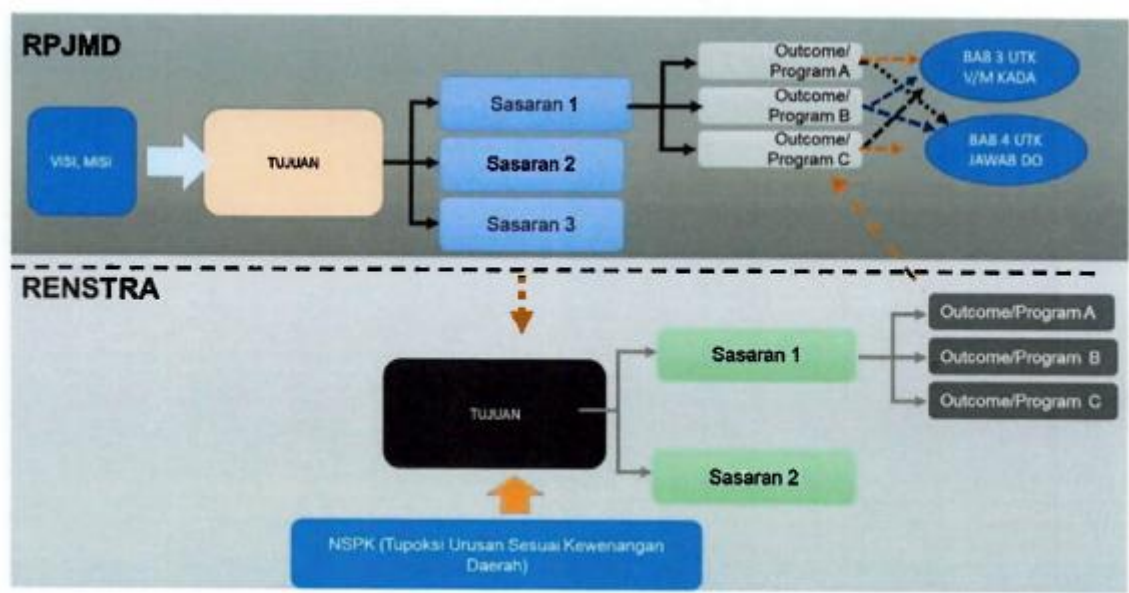
RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Jawai yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

- 1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
- 2. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
- 3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
- 4. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan.

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3. 1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Adapun teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Jawai dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Jawai

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan (Indeks)	89.30	90.01	90.20	90.40	90.60	90.80	91.01
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Poin)	72.90	73.50	75.00	76.50	78.00	79.50	81.00

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Adapun strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 2 Strategi PD dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Jawai Tahun 2025-2029

VISI : Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonis Mewujudkan Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan			
MISI IV : Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, dan pelayanan publik

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Sambas sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Jawai Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum	Penguatan tata kelola, layanan publik, dan infrastruktur sosial-ekonomi	✓ Peningkatan Pelayanan Publik ✓ Pemberdayaan Masyarakat ✓ Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum ✓ Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan ✓ Penguatan tata Kelola pemerintahan desa
2	Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat		
3	Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		
4	Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati		
5	Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum		
6	Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan		
7	Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/ atau kelurahan		

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
8	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang ada di Kecamatan		
9	melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan		

BAB IV

ROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

4.1 Uraian Program

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Rencana program yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas periode Renstra tahun 2025-2029 antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan adalah serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kemandirian, meningkatkan kesejahteraan, dan memampukan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan partisipasi aktif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kemajuan desa/kelurahan mereka. Program ini bersifat multidimensional, mencakup bidang pemerintahan, kelembagaan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, teknologi, dan sosial, serta

melibatkan peran aktif masyarakat sebagai penggagas dan fasilitator pembangunan

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum bertujuan untuk mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menegakkan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku. Program ini melibatkan koordinasi dengan instansi lain, seperti kepolisian dan TNI, serta masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menjaga kondisi yang kondusif dan bebas dari gangguan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum bertujuan untuk menangani urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota, meliputi pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan konflik sosial, serta pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk juga koordinasi pelaksanaan peraturan daerah dan pemeliharaan prasarana pelayanan umum

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa.

6. Program penunjang Urusan Pemerintaan Daerah Kabupaten/Kota.

Program penunjang Urusan Pemerintaan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan dalam mendukung kelancaran operasional, administrasi, dan manajemen perangkat daerah agar pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan berjalan optimal dan akuntabel.

Secara rinci Program Perangkat Daerah pada Renstra Kecamatan Jawai Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah Kecamatan Jawai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
7.01 - KECAMATAN					2.249.904.834,44		2.429.857.221,19		2.551.392.082,2		2.678.961.686,3		2.839.699.387,5
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.076.509.658,29		2.242.630.430,96		2.354.761.952,5		2.472.500.050,13		2.620.850.053,14
Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.076.509.658,29	100	2.242.630.430,96	100	2.354.761.952,5	100	2.472.500.050,13	100	2.620.850.053,14
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					30.745.852,5		32.898.062,17		34.213.984,65		35.582.544,03		37.361.671,24
Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	30.745.852,5	100	32.898.062,17	100	34.213.984,65	100	35.582.544,03	100	37.361.671,24
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					66.422.405,65		71.071.974,05		78.429.120,9		83.532.587,02		89.773.832,75
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	66.422.405,65	100	71.071.974,05	100	78.429.120,9	100	83.532.587,02	100	89.773.832,75

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					10.993.271		11.762.799,97		12.233.311,96		12.722.644,44		13.358.776,66
Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%)	100	100	100	10.993.271	100	11.762.799,97	100	12.233.311,96	100	12.722.644,44	100	13.358.776,66
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					19.551.422		20.920.021,54		21.756.822,39		22.627.095,28		23.758.450,04
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	19.551.422	100	20.920.021,54	100	21.756.822,39	100	22.627.095,28	100	23.758.450,04
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					45.682.225		50.573.932,5		49.996.889,8		51.996.765,4		54.596.603,67
Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%)	100	100	100	45.682.225	100	50.573.932,5	100	49.996.889,8	100	51.996.765,4	100	54.596.603,67
TOTAL KESELURUHAN					2249904834.44		2429857221.19		2551392082.20		2678961686.30		2839699387.50

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Adapun kegiatan yang disusun adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
12. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
13. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
14. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
15. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
16. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.3 Uraian Sub Kegiatan

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Mojosari merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Jawai juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah.

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Mojosari dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Jawai

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN JAWAI						
- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efesien	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efesien				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan (Indeks)	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai Sakip Perangkat Daerah (Poin)	
		Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
				Pemerintahan Daerah		
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan		Persentase Pelayanan yang Terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
				Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
				Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan		Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
				Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Meningkatnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Dibina	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
			Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum		Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Terkait Ketertraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
				Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
				Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
					Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
					Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat)	7.01.05.2.01.0006 - Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
			Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik		Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
				Pemerintahan Desa		
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01 - KECAMATAN				2.249.904.834,44		2.429.857.221,19		2.551.392.082,2		2.678.961.686,3		2.839.699.387,5
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.076.509.658,29		2.242.630.430,96		2.354.761.952,5		2.472.500.050,13		2.620.850.053,14
Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	2.076.509.658,29	100	2.242.630.430,96	100	2.354.761.952,5	100	2.472.500.050,13	100	2.620.850.053,14
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.150.114		15.756.118,56		16.386.363,32		17.041.817,86		19.513.831,85
Tersedianya dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	18	18	15.150.114	18	15.756.118,56	18	16.386.363,32	18	17.041.817,86	18	19.513.831,85
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		3	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.057.860		3.180.174,4		3.307.381,38		3.439.676,63		5.367.605
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	3.057.860	2	3.180.174,4	2	3.307.381,38	2	3.439.676,63	3	5.367.605
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.742.423		1.812.119,92		1.884.604,72		1.959.988,91		2.038.388,46
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.742.423	1	1.812.119,92	1	1.884.604,72	1	1.959.988,91	1	2.038.388,46
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.742.423		1.812.119,92		1.884.604,72		1.959.988,91		2.038.388,46
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.742.423	1	1.812.119,92	1	1.884.604,72	1	1.959.988,91	1	2.038.388,46
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.742.423		1.812.119,92		1.884.604,72		1.959.988,91		2.038.388,46

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.742.423	1	1.812.119,92	1	1.884.604,72	1	1.959.988,91	1	2.038.388,46
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.742.423		1.812.119,92		1.884.604,72		1.959.988,91		2.038.388,46
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.742.423	1	1.812.119,92	1	1.884.604,72	1	1.959.988,91	1	2.038.388,46
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.365.404		2.460.020,16		2.558.420,97		2.660.757,81		2.767.188,12
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	2.365.404	1	2.460.020,16	1	2.558.420,97	1	2.660.757,81	1	2.767.188,12
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.757.158		2.867.444,32		2.982.142,09		3.101.427,78		3.225.484,89
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	18	18	2.757.158	18	2.867.444,32	18	2.982.142,09	18	3.101.427,78	18	3.225.484,89
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.824.178.499,65		1.967.518.701,78		2.064.365.200,64		2.166.051.406,98		2.294.116.139,73
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	1.824.178.499,65	1	1.967.518.701,78	1	2.064.365.200,64	1	2.166.051.406,98	1	2.294.116.139,73

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18		18		18		18		18	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17	15		15		15		15		15	
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.788.606.553,65		1.931.695.077,94		2.028.279.831,84		2.129.693.823,43		2.257.475.452,84
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17	15	1.788.606.553,65	15	1.931.695.077,94	15	2.028.279.831,84	15	2.129.693.823,43	15	2.257.475.452,84
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				29.280.000		29.280.000		29.280.000		29.280.000		29.280.000
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	29.280.000	1	29.280.000	1	29.280.000	1	29.280.000	1	29.280.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.210.076		2.298.479,04		2.390.418,2		2.486.034,93		2.585.476,33
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	2.210.076	1	2.298.479,04	1	2.390.418,2	1	2.486.034,93	1	2.585.476,33
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.040.935		2.122.572,4		2.207.475,3		2.295.774,31		2.387.605,28
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	2.040.935	18	2.122.572,4	18	2.207.475,3	18	2.295.774,31	18	2.387.605,28
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2.040.935		2.122.572,4		2.207.475,3		2.295.774,31		2.387.605,28
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	2.040.935	1	2.122.572,4	1	2.207.475,3	1	2.295.774,31	1	2.387.605,28
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35.000.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		20.000.000
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	15	35.000.000	0	12.500.000	0	12.500.000		12.500.000	15	20.000.000
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	1		1		1		1		1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				22.500.000		0		0		0		7.500.000
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	15	22.500.000	0	0	0	0		0	15	7.500.000
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				54.653.928,65		93.707.409,99		103.223.459,88		113.275.619,49		118.030.827,51
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	54.653.928,65	1	93.707.409,99	1	103.223.459,88	1	113.275.619,49	1	118.030.827,51
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	39	15		15		15		15		15	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9	4		4		4		4		4	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	25	15		15		15		15		15	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.107.494		15.711.793,76		16.340.265,51		16.993.876,13		17.673.631,18
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	15.107.494	5	15.711.793,76	5	16.340.265,51	5	16.993.876,13	5	17.673.631,18
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.185.764,5		5.393.195,08		5.608.922,88		5.833.279,8		6.066.610,99
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	25	15	5.185.764,5	15	5.393.195,08	15	5.608.922,88	15	5.833.279,8	15	6.066.610,99
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.288.198,25		6.539.726,18		6.801.315,23		7.073.367,84		7.356.302,55
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	39	15	6.288.198,25	15	6.539.726,18	15	6.801.315,23	15	7.073.367,84	15	7.356.302,55
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.435.138		5.652.543,52		5.878.645,26		6.113.791,07		6.358.342,71
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9	4	5.435.138	4	5.652.543,52	4	5.878.645,26	4	6.113.791,07	4	6.358.342,71
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		5.185.764,5		5.393.195,08		5.608.922,88		5.833.279,8
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	0	1	5.185.764,5	1	5.393.195,08	1	5.608.922,88	1	5.833.279,8
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22.637.333,9		55.224.386,95		63.201.115,92		71.652.381,77		74.742.660,28

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	22.637.333,9	1	55.224.386,95	1	63.201.115,92	1	71.652.381,77	1	74.742.660,28
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				47.536.716,67		49.158.185,33		50.137.312,75		51.155.605,25		52.214.629,47
Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	3	47.536.716,67	3	49.158.185,33	3	50.137.312,75	3	51.155.605,25	3	52.214.629,47
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	1		1		1		1		1	
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24.000.000		24.680.000		24.680.000		24.680.000		24.680.000
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	24.000.000	1	24.680.000	1	24.680.000	1	24.680.000	1	24.680.000
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				6.000.000		6.240.000		6.489.600		6.749.184		7.019.151,36
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	2	6.000.000	2	6.240.000	2	6.489.600	2	6.749.184	2	7.019.151,36
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.866.666,67		9.221.333,33		9.590.186,67		9.973.794,13		10.372.745,9
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	3	8.866.666,67	3	9.221.333,33	3	9.590.186,67	3	9.973.794,13	3	10.372.745,9

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.670.050		9.016.852		9.377.526,08		9.752.627,12		10.142.732,21
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	1	8.670.050	1	9.016.852	1	9.377.526,08	1	9.752.627,12	1	10.142.732,21
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				76.677.216		79.744.304,64		82.934.076,82		86.251.439,9		89.701.497,49
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	76.677.216	1	79.744.304,64	1	82.934.076,82	1	86.251.439,9	1	89.701.497,49
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.400.000		2.496.000		2.595.840		2.699.673,6		2.807.660,54
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.400.000	1	2.496.000	1	2.595.840	1	2.699.673,6	1	2.807.660,54
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				32.269.440		33.560.217,6		34.902.626,3		36.298.731,36		37.750.680,61
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	32.269.440	1	33.560.217,6	1	34.902.626,3	1	36.298.731,36	1	37.750.680,61
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				42.007.776		43.688.087,04		45.435.610,52		47.253.034,94		49.143.156,34

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	42.007.776	1	43.688.087,04	1	45.435.610,52	1	47.253.034,94	1	49.143.156,34
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				23.313.183,32		24.245.710,66		25.215.539,09		26.224.160,65		27.273.127,09
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	23.313.183,32	5	24.245.710,66	5	25.215.539,09	5	26.224.160,65	5	27.273.127,09
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	10		10		10		10		10	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10		10		10		10		10	
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.829.850		16.463.044		17.121.565,76		17.806.428,39		18.518.685,53
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10	15.829.850	10	16.463.044	10	17.121.565,76	10	17.806.428,39	10	18.518.685,53
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.736.666,67		2.846.133,33		2.959.978,67		3.078.377,81		3.201.512,93
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	2.736.666,67	5	2.846.133,33	5	2.959.978,67	5	3.078.377,81	5	3.201.512,93
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				4.746.666,65		4.936.533,33		5.133.994,66		5.339.354,45		5.552.928,63

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	10	4.746.666,65	10	4.936.533,33	10	5.133.994,66	10	5.339.354,45	10	5.552.928,63
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				30.745.852,5		32.898.062,17		34.213.984,65		35.582.544,03		37.361.671,24
Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	30.745.852,5	100	32.898.062,17	100	34.213.984,65	100	35.582.544,03	100	37.361.671,24
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3.743.990		4.006.069,3		4.166.312,07		4.332.964,55		4.549.612,78
Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1	3.743.990	1	4.006.069,3	1	4.166.312,07	1	4.332.964,55	1	4.549.612,78
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3.743.990		4.006.069,3		4.166.312,07		4.332.964,55		4.549.612,78
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1	3.743.990	1	4.006.069,3	1	4.166.312,07	1	4.332.964,55	1	4.549.612,78

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				11.662.602		12.478.984,14		12.978.143,5		13.497.269,24		14.172.132,7
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	11.662.602	1	12.478.984,14	1	12.978.143,5	1	13.497.269,24	1	14.172.132,7
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				3.500.000		3.745.000		3.894.800		4.050.592		4.253.121,6
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	3.500.000	1	3.745.000	1	3.894.800	1	4.050.592	1	4.253.121,6
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8.162.602		8.733.984,14		9.083.343,5		9.446.677,24		9.919.011,1
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	8.162.602	1	8.733.984,14	1	9.083.343,5	1	9.446.677,24	1	9.919.011,1
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				15.339.260,5		16.413.008,73		17.069.529,08		17.752.310,24		18.639.925,76

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1	1	15.339.260,5	1	16.413.008,73	1	17.069.529,08	1	17.752.310,24	1	18.639.925,76
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				15.339.260,5		16.413.008,73		17.069.529,08		17.752.310,24		18.639.925,76
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1	1	15.339.260,5	1	16.413.008,73	1	17.069.529,08	1	17.752.310,24	1	18.639.925,76
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				66.422.405,65		71.071.974,05		78.429.120,9		83.532.587,02		89.773.832,75
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	66.422.405,65	100	71.071.974,05	100	78.429.120,9	100	83.532.587,02	100	89.773.832,75
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				62.016.415,65		66.357.564,75		73.526.135,23		78.433.481,93		84.419.772,4
Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1	1	62.016.415,65	1	66.357.564,75	1	73.526.135,23	1	78.433.481,93	1	84.419.772,4
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	39	39		39		39		39		39	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	9	9		9		9		9		9	
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10.861.311		11.621.602,77		12.086.466,88		12.569.925,55		13.198.421,83
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	39	39	10.861.311	39	11.621.602,77	39	12.086.466,88	39	12.569.925,55	39	13.198.421,83
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				4.400.000		4.708.000		4.896.320		5.092.172,8		5.346.781,44
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1	1	4.400.000	1	4.708.000	1	4.896.320	1	5.092.172,8	1	5.346.781,44
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				46.755.104,65		50.027.961,98		56.543.348,35		60.771.383,58		65.874.569,13
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	9	9	46.755.104,65	9	50.027.961,98	9	56.543.348,35	9	60.771.383,58	9	65.874.569,13

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4.405.990		4.714.409,3		4.902.985,67		5.099.105,09		5.354.060,35
Meningkatnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Dibina	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	4.405.990	1	4.714.409,3	1	4.902.985,67	1	5.099.105,09	1	5.354.060,35
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4.405.990		4.714.409,3		4.902.985,67		5.099.105,09		5.354.060,35
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	4.405.990	1	4.714.409,3	1	4.902.985,67	1	5.099.105,09	1	5.354.060,35
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				10.993.271		11.762.799,97		12.233.311,96		12.722.644,44		13.358.776,66
Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%)	100	100	10.993.271	100	11.762.799,97	100	12.233.311,96	100	12.722.644,44	100	13.358.776,66
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				3.840.486		4.109.320,02		4.273.692,82		4.444.640,53		4.666.872,56
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Terkait Ketertraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	1	3.840.486	1	4.109.320,02	1	4.273.692,82	1	4.444.640,53	1	4.666.872,56
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3.840.486		4.109.320,02		4.273.692,82		4.444.640,53		4.666.872,56
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	1	3.840.486	1	4.109.320,02	1	4.273.692,82	1	4.444.640,53	1	4.666.872,56

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				7.152.785		7.653.479,95		7.959.619,14		8.278.003,91		8.691.904,1
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	3	3	7.152.785	3	7.653.479,95	3	7.959.619,14	3	8.278.003,91	3	8.691.904,1
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				7.152.785		7.653.479,95		7.959.619,14		8.278.003,91		8.691.904,1
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	3	3	7.152.785	3	7.653.479,95	3	7.959.619,14	3	8.278.003,91	3	8.691.904,1
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				19.551.422		20.920.021,54		21.756.822,39		22.627.095,28		23.758.450,04
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	19.551.422	100	20.920.021,54	100	21.756.822,39	100	22.627.095,28	100	23.758.450,04

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				19.551.422		20.920.021,54		21.756.822,39		22.627.095,28		23.758.450,04
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	80	80	19.551.422	80	20.920.021,54	80	21.756.822,39	80	22.627.095,28	80	23.758.450,04
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	40	40		40		40		40		40	
	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat)	3	3		3		3		3		3	
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				9.439.768		10.100.551,76		10.504.573,83		10.924.756,78		11.470.994,62
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	40	40	9.439.768	40	10.100.551,76	40	10.504.573,83	40	10.924.756,78	40	11.470.994,62
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				5.061.279		5.415.568,53		5.632.191,27		5.857.478,92		6.150.352,86

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	80	80	5.061.279	80	5.415.568,53	80	5.632.191,27	80	5.857.478,92	80	6.150.352,86
7.01.05.2.01.0006 - Pengembangan Kehidupan Demokrasi				2.635.185		2.819.647,95		2.932.433,86		3.049.731,22		3.202.217,78
berdasarkan Pancasila												
Berkembangnya Lembaga Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat)	3	3	2.635.185	3	2.819.647,95	3	2.932.433,86	3	3.049.731,22	3	3.202.217,78
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2.415.190		2.584.253,3		2.687.623,43		2.795.128,36		2.934.884,78
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1	2.415.190	1	2.584.253,3	1	2.687.623,43	1	2.795.128,36	1	2.934.884,78
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				45.682.225		50.573.932,5		49.996.889,8		51.996.765,4		54.596.603,67
Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%)	100	100	45.682.225	100	50.573.932,5	100	49.996.889,8	100	51.996.765,4	100	54.596.603,67
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				45.682.225		50.573.932,5		49.996.889,8		51.996.765,4		54.596.603,67
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	1	45.682.225	1	50.573.932,5	1	49.996.889,8	1	51.996.765,4	1	54.596.603,67
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	-	0		1		0		0		0	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	2	2		2		2		2		2	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2.500.000		2.675.000		2.782.000		2.893.280		3.037.944
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	1	2.500.000	1	2.675.000	1	2.782.000	1	2.893.280	1	3.037.944
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2.500.000		2.675.000		2.782.000		2.893.280		3.037.944
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1	2.500.000	1	2.675.000	1	2.782.000	1	2.893.280	1	3.037.944
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				25.182.225		26.138.932,5		27.184.489,8		28.271.869,4		29.685.462,87
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	2	2	25.182.225	2	26.138.932,5	2	27.184.489,8	2	28.271.869,4	2	29.685.462,87
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2.500.000		2.675.000		2.782.000		2.893.280		3.037.944
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1	2.500.000	1	2.675.000	1	2.782.000	1	2.893.280	1	3.037.944
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0		2.500.000		0		0		0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	-	0	0	1	2.500.000	0	0	0	0	0	0
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2.500.000		2.675.000		2.782.000		2.893.280		3.037.944
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1	2.500.000	1	2.675.000	1	2.782.000	1	2.893.280	1	3.037.944
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				8.000.000		8.560.000		8.902.400		9.258.496		9.721.420,8
Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	1	8.000.000	1	8.560.000	1	8.902.400	1	9.258.496	1	9.721.420,8
7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				2.500.000		2.675.000		2.782.000		2.893.280		3.037.944
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	2.500.000	1	2.675.000	1	2.782.000	1	2.893.280	1	3.037.944

4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jawai sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jawai

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN JAWAI								
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	Indeks	89,3	90,01	90,2	90,4	90,6	90,8	91,01

4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Jawai sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Jawai

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	7.01 - KECAMATAN									
1	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase penanganan kasus	positif	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	pelanggaran dan ketertiban umum									
5	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Pelayanan yang Terselesaikan di Tingkat Kecamatan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan di bidang urusan pemerintahan di wilayah kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan di bidang urusan pemerintahan di wilayah kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan dalam kerangka mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Sambas yang telah di spesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Sambas. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan dan atau target kinerja sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Laporan Kinerja itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dimasa yang akan datang.

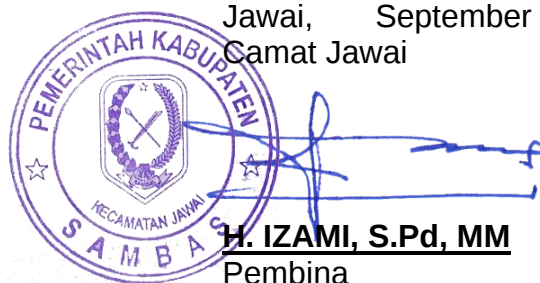
Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah Kecamatan Jawai berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Perangkat Daerah Kecamatan Jawai berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja Tahunan;

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin ya robbal 'alamiin.

Jawai, September 2025
Camat Jawai



H. IZAMI, S.Pd, MM
Pembina
NIP. 19700506 199803 1 003

LAMPIRAN